



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKHMAD SUDIRMAN TAVIPIYONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **644491**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.605.305.650

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.655.655.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 665.650.650
3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 369.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOTOR, HONDA ACHQM21B04AIT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF10AIT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 S CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 260.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 303.209.757**F. HARTA LAINNYA** Rp. 190.000.000**Sub Total** Rp. 3.728.765.407**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.728.765.407



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.